

## **PERBANDINGAN KEPEMIMPINAN NEGARA MALAYSIA DAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG MENGANUT SISTEM DEMOKRASI**

**Siti Marwah<sup>1</sup> Eka Yulyana<sup>2</sup>**

*Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia*<sup>1,2</sup>

E-mail : [2010631180032@student.unsika.ac.id](mailto:2010631180032@student.unsika.ac.id),

[eka.yulyana@staff.unsika.ac.id](mailto:eka.yulyana@staff.unsika.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Indonesia and Malaysia are two developing countries in the Asean region with similarities in adopting a democratic system for their government. A democratic system that implements the division of power into three parts according to Montesquieu's theory, namely legislative, judicial and executive. Malaysia is a federal country and Indonesia is a republic. The application of democracy is also demonstrated by delegation through general elections, in this case the community is involved in making decisions regarding who has the right to represent them and elect the head of state. The research was carried out through a qualitative literature study approach using linear references to research literatur from various scientific articles to methodically compile or obtain scientific knowledge. The results of this study found that there are various differences in leadership applications even though both adhere to a democratic system. This is motivated by various factors including, background, form of country, ideology and philosophy.*

**Keywords:** *Leadership, Democracy, Indonesia, Malaysia*

### **ABSTRAK**

*Indonesia dan Malaysia merupakan kedua negara berkembang yang berada di wilayah Asean dengan kesamaan menganut system demokrasi untuk pemerintahannya. Sistem demokrasi yang menerapkan pembagian kekuasaan menjadi tiga bagian sebagaimana teori Montesquieu yaitu legislative, yudikatif dan eksekutif. Malaysia merupakan negara federal dan Indonesia adalah negara republik, aplikasi demokrasi juga ditunjukkan dengan adanya pendelegasian melalui pemilihan umum, dalam hal ini masyarakat dilibatkan untuk mengambil keputusan mengenai siapa yang berhak dapat mewakilinya dan memilih kepala negara. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif studi literatur dengan menggunakan referensi yang linear dengan literatur penelitian dari berbagai artikel ilmiah untuk menyusun atau memperoleh pengetahuan ilmiah secara metodis. Hasil dari*

*kajian ini ditemukan bahwasanya terdapat berbagai perbedaan aplikasi kepemimpinan meskipun keduanya menganut sistem demokrasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor diantaranya, latar belakang, bentuk negara, ideologi dan falsafah.*

**Kata Kunci:** *Kepemimpinan, Demokrasi, Indonesia, Malaysia*

## **PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan suatu tatanan negara, tentunya diperlukan suatu sistem terpadu yang dapat menunjang kedaulatan negara guna mempertahankan kesatuan dan persatuan dari segala kemungkinan yang dapat terjadi, serta mengatur urusan hukum dan politik yang begitu kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembagian kekuasaan untuk mendorong efektivitas suatu pemerintahan. Demikian yang dirumuskan oleh Montesquieu, yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yang dikenal sebagai trias politica. Trias politica membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang dapat melahirkan kesewenang-wenangan. Ajaran ini banyak dianut oleh berbagai negara demokratis di dunia, tak terkecuali Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia, yang merupakan negara di ASEAN, sama-sama menganut sistem demokrasi, begitu juga dengan banyak negara di dunia.

Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental,

seperti yang ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur. Studi ini menyimpulkan bahwa di negara-negara demokrasi, pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (DJ, 2018). Negara demokrasi menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan suara, sesuai dengan konsep demokrasi itu sendiri, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti melalui pemilihan umum, dapat dijadikan wadah aspirasi yang turut serta dalam mencapai tujuan dan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Konstitusi Indonesia mengatur demokrasi, sejak perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengakui kedaulatan rakyat, dan Negara Indonesia berkembang menjadi negara hukum (Amalia et al., 2023). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD" dan "Negara Indonesia adalah negara hukum." Berdasarkan pasal tersebut,

maka jelas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Jadi, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter.

Tentunya dalam praktik demokrasi ini tidak terlepas dari adanya pemimpin dan kepemimpinan, yang salah satunya menjadi faktor yang menunjang keberhasilan suatu organisasi. Secara teoritis, konsep pemimpin sendiri memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tercapainya tujuan, yaitu melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan (Daswati, 2012). Melalui kepemimpinan, memungkinkan seorang pemimpin mampu mengarahkan dan mempengaruhi pengikutnya untuk bersinergi mencapai tujuan bersama (Willyam Feirry Abeidneigo, Thamrin, 2014).

Tentunya setiap organisasi maupun negara memiliki model kepemimpinan yang berbeda-beda, hal ini didasarkan pada penyesuaian capaian tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia et al., 2023) mengenai analisa kepemimpinan di Amerika Serikat dan di Indonesia yang mengadopsi sistem demokrasi. Dimana, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan sebagai negara yang mengadopsi sistem demokrasi, namun pada praktiknya terdapat perbedaan yang didasarkan

pada ideologi, falsafah, dan nilai yang dianut. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Toni Nasution, Nur H Sireigar, Faiz Agung, dkk, 2023) dalam penelitiannya mengenai persamaan dan perbedaan politik Indonesia dan negara lain, di mana Indonesia dan India sama-sama mengadopsi sistem demokrasi, hanya saja pada aplikasinya Indonesia menjalankan demokrasi Pancasila, sementara India menjalankan demokrasi liberal. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Angkasa, 2020) menyebutkan bahwa Finlandia dan Swedia merupakan kedua negara yang sama-sama mengadopsi sistem demokrasi, hanya saja terdapat perbedaan di dalamnya mengenai siapa yang dapat menduduki posisi eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat gap penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut, yaitu dengan variabel kepemimpinan, di mana kepemimpinan menjadi hal yang penting untuk tercapainya visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengkaji "Perbandingan Kepemimpinan Indonesia dan Malaysia sebagai Negara yang Mengadopsi Sistem Demokrasi." Adapun tujuan dari penelitian ini lebih lanjut adalah untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan apa saja yang menjadi perbedaan dari sisi kepemimpinan dan dampaknya terhadap demokrasi yang dijalankan oleh kedua negara ini.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata “Deimos” dan “Kratos”. Deimos yang memiliki arti rakyat dan Kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Menurut Sidney Hook dalam (Dwi Sulisworo et al., 2016), demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sedangkan pengertian demokrasi yang dikutip dari buku *Eixplore Pendidikan Kewarganegaraan* karya Drs. Tijan, M.Si, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah "pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Sehingga dapat didefinisikan bahwasanya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kesepakatan rakyat yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih.

Menurut Abdurrahman Wahid dalam (H. Nihaya, 2016), nilai demokrasi itu ada yang bersifat pokok dan ada pula yang bersifat derivatif

atau lanjutan dari yang pokok. Ada tiga hal nilai pokok dalam demokrasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan dan pemilihan wakil rakyat, masyarakat dilibatkan, dimana demokrasi dicirikan dengan adanya pemilihan umum (Saleh, 2008).

Menurut James M. Black dalam bukunya *Management: A Guide to Executive Command*, kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah unik dan tidak dapat diwariskan secara otomatis. Setiap pemimpin memiliki karakteristik tertentu yang timbul pada situasi yang berbeda (Achuia dan Luisier, 2020).

Menurut Huigeis Ginneitt, dan Cuirphy dalam Suitarto Wijono (2018:2), kepemimpinan adalah sebuah fenomena yang kompleks meliputi tiga elemen yaitu pemimpin, para pengikut, dan situasi (Suisanto et al., 2022). Dan dikemukakan oleh Ricky Ronald dalam Suitarto Wijono (2018:3) yang mengemukakan bahwa kepemimpinan (Leadership) adalah proses memotivasi orang lain atau pengikutnya untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah suatu usaha merealisasikan tujuan organisasi dengan melibatkan kebijaksanaan para pengikutnya untuk

terus tumbuh berkembang seiring dengan tujuan organisasi. Melalui definisi tersebut, bahwasanya kepemimpinan merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuannya. Dengan demikian, seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi, mengarahkan, dan mendorong para pengikutnya untuk terus mencapai organisasi dengan menggunakan kewenangannya.

Menurut Rinawati (2019) dalam (Eikasari, 2023):

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter

Gaya kepemimpinan otoriter merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki unsur kewenangan dengan paksaan atau kekerasan pemimpin terhadap bawahannya yang harus dipatuhi. Gaya otoriter ini biasanya sering digunakan oleh kepemimpinan militer. Istilah otoriter atau otokrat berasal dari kata *autos*, yang berarti sendiri, dan *kratos*, yang berarti kekuasaan atau kekuatan.

2. Gaya Kepemimpinan Pseudo-Demokratis

Kegiatan kepemimpinan demokratis tidak terletak pada pemimpinnya, tetapi terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok.

Gaya kepemimpinan seperti ini sebenarnya otokratis, tetapi dalam kepemimpinannya ia memberikan kesan demokratis.

3. Gaya Kepemimpinan Bebas

Gaya kepemimpinan bebas diartikan membiarkan orang-orang berbuat sesuka hati mereka. Gaya kepemimpinan seperti ini, sang pemimpin praktis tidak memimpin. Pemimpin seperti ini sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan para bawahan atau anggotanya.

4. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Gaya kepemimpinan demokratis ini adalah gaya kepemimpinan yang paling ideal. Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang kooperatif dan tidak diktator. Dia selalu mengestimasi anggota-anggota kelompoknya dan selalu mempertimbangkan kesejahteraan serta kemampuan kelompoknya.

5. Gaya Kepemimpinan Karismatik

Kepemimpinan karismatik adalah tipe kepemimpinan yang memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa

untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan memiliki keistimewaan yang sangat tinggi.

6. Gaya Kepemimpinan Paternalistis  
Tipe pemimpin ini menganggap bahwa bawahan tidak bisa bersifat

mandiri dan perlu dorongan dalam melakukan tugasnya. Pemimpin ini selalu melindungi bawahannya. Pemimpin paternalistik memiliki sifat maha tahu yang besar sehingga jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Judul , Peneliti, tahun	Metode	Hasil	Perbedaan
1	Perbandingan Sistem Kenegaraan di Swedia dan Finlandia Berdasarkan Sistem Politiknya (Angkasa, 2020)	Yuridis normative	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem politik yang berjalan di Swedia dan juga di Finlandia, sebenarnya yang menjadi perbedaan hanya terletak di siapa yang menduduki badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang menjadi input, antara kedua negara juga sama-sama memiliki kelompok kepentingan. Bisa dari kelompok anomi, kelompok non asosiasional, kelompok institusional, maupun kelompok asosiasional.	Objek penelitian serta variabel penelitian serta metode penelitian
2	Persamaan dan Perbedaan Sistem Demokrasi Indonesia dengan Negara Lain (Toni Nasution, Nur H. Siregar, Faiz Agung, dkk. 2023)	Studi Literatur	• Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menerapkan sistem demokrasi modern dan presidensial. Namun, perbedaan	Objek penelitian dan variabel penelitian

			<p>terdapat pada sistem pemilihan, di mana masyarakat Indonesia dapat memilih secara langsung, sedangkan masyarakat Amerika Serikat tidak memilih secara langsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negara Indonesia dan India juga memiliki kesamaan, sama-sama menerapkan sistem demokrasi presidensial dan pemilihan presiden di negara Indonesia dan negara India sama-sama melibatkan partai politik, anggota parlemen, dan legislatif. Sedangkan untuk perbedaan antara negara Indonesia dan India, negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, sedangkan negara India menganut sistem demokrasi liberal.</li> </ul>	
3	Demokrasi Civil Society di Indonesia dan India: Sebuah Perbandingan (Geimaeil Flamirion dan Muiradi, 2016)	Studi Literatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan kajian penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya proses demokrasi civil society di kedua negara memiliki kesamaan, yaitu secara kuantitas,</li> </ul>	Objek penelitian

			<p>bonus demografi, dan proses transisi demokrasi. Di mana pada kedua negara ini muncul fenomena civil society yang "sakit" atau (un)civil society (meminjam istilah Veronika Bettinger-Leiei).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat perbedaan secara signifikan antara perspektif natural dan liberal yang struktur sosialnya beragam, namun keberadaan civil society dalam proses demokratisasi pada kedua negara ini juga tidak dapat dinikmati semua orang, melainkan masih dikuasai kepentingan-kepentingan elit yang menguasai modal politik dan ekonomi.</li> </ul>	
--	--	--	---	--

**METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan (literature review atau literature research) merupakan penelitian yang menelaah, meninjau, atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide, atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik

(academic-oriented literature), serta mengungkapkan dan mengonstruksi kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu (Marzuki, 2005). Metode analisis dalam penelitian dengan kajian literatur ini bersifat analisis deskriptif, yaitu interpretasi gagasan atau informasi/data dilakukan secara tertulis kemudian diberikan penjelasan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik. Tujuan dari metodologi



penelitian ini adalah untuk menghasilkan penelitian yang kompeten, kredibel, dan relevan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data antara lain dengan membaca berbagai artikel dan menggunakan data sekunder dan primer.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan dalam skala pemerintahan tidak hanya berfokus pada gaya kepemimpinan yang dianut,

lebih dari itu kepemimpinan melibatkan berbagai aspek dan memainkan peranan penting dalam organisasi (Heirsuigondo, 2018). Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang menganut demokrasi memiliki berbagai perbedaan dalam sistem kepemimpinan dan politiknya. Hal ini didasari atas latar belakang, sistem kebijakan, dan bentuk pemerintahan yang diadopsi.

**Tabel 2. Perbandingan Gaya Kepemimpinan Negara Indonesia dan Negara Malaysia**

Indikator	Indonesia	Malaysia
<b>Pola Kepemimpinan</b>	Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."	Malaysia menganut sistem pemerintahan parlementer yang berdasarkan pada model British Westminster. Dalam Pasal 32 dan 40 Konstitusi Federal Malaysia, disebutkan bahwa Yang di-Pertuan Agong merupakan seorang raja dan ratu konstitusional yang dipilih untuk menjabat selama lima tahun oleh penguasa turun-temurun kesembilan kesultanan di Malaysia (sebagai Conference of Rulers).
<b>Legislatif</b>	MPR sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat yang terdiri atas DPD dan DPRD yang bersama-sama membentuk parlemen, dengan masa jabatan lima tahun, dan didasarkan pada hak konstitusi. MPR memiliki posisi yang lebih tinggi dari DPD, sehingga MPR sangat menonjol dalam sistem pemerintahan Indonesia.	Badan legislatif ini terdiri atas Dewan Rakyat dan Dewan Negara (senat). Dalam hal ini, Dewan Rakyat dipilih melalui pemilu, sedangkan Dewan Negara dipilih oleh majelis legislatif negara bagian dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.
<b>Fungsi Legislasi</b>	Mengawasi presiden, wakil	Bertanggung jawab untuk

	presiden, dan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang berlaku sekaligus bertindak membuat undang-undang.	meloloskan, mengamandemen, dan mencabut undang-undang yang mana setiap proses legislasi berada di bawah pengawasan dan persetujuan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan aturan Pasal 39 Konstitusi.
<b>Gaya Kepemimpinan</b>	Gaya kepemimpinan otoritatif	Gaya kepemimpinan demokrasi
<b>Sistem Pemerintahan</b>	Menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta prinsip checks and balances yang menghendaki pembagian kekuasaan yang setara dan saling mengontrol satu sama lain.	Monarki parlementer, di bawah pemerintahan monarki. Dipimpin oleh seorang perdana menteri yang berasal dari dewan rakyat melalui pemilihan langsung oleh rakyat dan mendapat persetujuan dari raja. Dalam menjalankan tugasnya, perdana menteri dibantu oleh parlemen.
<b>Sistem Hukum</b>	Menganut sistem hukum civil law. Halnya terdapat pembatasan peran hakim untuk membuat hukum di negara. Namun, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Indonesia menganut sistem hukum campuran, yaitu sistem hukum civil law, hukum adat, dan hukum Islam.	Menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Yaitu hukum yang muncul dari tiga periode penting dalam sejarah Malaysia, yakni dari Kesultanan Malaka, penyebaran Islam ke Asia Tenggara, dan selanjutnya penerapannya oleh budaya hukum pemerintahan kolonial Inggris yang memperkenalkan pemerintahan yang konstitusional dan sistem hukum Anglo-Saxon.
<b>Pemilihan Umum</b>	Memiliki 3 macam pemilihan umum, yaitu pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden. Adapun dewan perwakilan daerah menggunakan sistem distrik dengan wakil banyak, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan dilantik oleh MPR. Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali.	Memiliki dua tingkatan, yaitu tingkat federal atau persekutuan serta tingkat negara bagian. Pemilihan tingkat federal untuk memilih dewan rakyat, sedangkan tingkat negara bagian untuk memilih dewan undangan negeri yang nantinya menduduki majelis legislasi negara bagian. Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali.

<b>Kepala Pemerintah</b>	<b>Presiden</b>	<b>Perdana Menteri</b>
<b>Syarat bergabung ke pemerintah</b>	Warga negara Indonesia, lahir dan bertempat tinggal di Indonesia, tidak memiliki catatan kriminal dan mampu bertanggung jawab mengemban amanah.	Warga negara Malaysia yang berusia minimal 18 tahun dan 21 tahun untuk di Johor, tidak memiliki catatan kejahatan.

Berdasarkan kajian Tabel 2 di atas, dapat diketahui perbedaan yang signifikan di antara keduanya, meskipun kedua negara menganut demokrasi, namun aplikasi yang dijalankan cenderung berbeda. Hal ini berdasarkan ideologi yang digunakan, di mana Indonesia menganut ideologi Pancasila dan Malaysia menganut ideologi hukum negara serta sistem demokrasi yang dianut merupakan parlementer, sedangkan Indonesia menganut demokrasi Pancasila (Presidensial) yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian pembahasan di atas mengenai analisis kepemimpinan Negara Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, dapat disimpulkan bahwa kedua negara ini memiliki kesamaan untuk menganut sistem demokrasi. Namun, pada praktiknya disesuaikan dengan ideologi yang dianut, latar belakang, sistem kebijakan, bentuk negara, dan falsafah merupakan salah satu hal yang memengaruhi perbedaan-perbedaan ini, di mana Indonesia sendiri

menganut falsafah gotong royong dengan mengedepankan nilai persaudaraan dan kesejahteraan dibandingkan kebebasan, sedangkan falsafah negara Malaysia adalah falsafah hukum negara dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta keluhuran perlembagaan dan kedaultan undang-undang dan kesopanan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achua, dan Luisieir. (2020). BAB II Kepemimpinan dan Komunikasi. Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents, 3(April), 49–58.
- Amalia, R., Van Graha, F., Maharani, R., & Akbar Alva Rizky, N. (2023). Analisis Kepemimpinan di Amerika Serikat dan di Indonesia yang Menganut Sistem Demokrasi. *Educational Leadership: Journal Management Pendidikan*, 3(1), 115–121. <https://doi.org/10.24252/eidu.i.v3i1.36822>
- Angkasa, N. (2020). Perbandingan Sistem Kenegaraan di Swedia dan Finlandia Berdasarkan

- Sistem Politiknnya. 4(2).
- Daswati. (2012). Daswati. Fisip Untad, 04(01), 783–798.
- DJ, Y. (2018). Negara Hukum yang Demokratis Menurut Konstitusi. 12, 41–62.
- Dwi Sulisworo, T., Wahyuiningsih, D., & Arif, B. (2016). Demokrasi. Bahan Ajar, 177–201.  
<https://doi.org/10.14527/9786053184034.07>
- Eikasari, N. (2023). BAB II Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran. 01, 1–35.
- Fithriana, A., & Annissa, J. (2017). Perbandingan Kualitas Demokrasi Dalam Perspektif Kesetaraan Gender Antara Indonesia dan Thailand. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2), 1–19.  
<https://doi.org/10.21009/jimd.v16i2.8753>
- Geimaeil Flamirion, dan Muiradi. (2016). Democracy and Civil Society in Indonesia and India: A Comparison Study. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 189–195.
- H. Nihaya, M. (2016). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. *Suileisana*, 10(2), 35–49.
- Heirsuigondo, E. S. (2018). Kepemimpinan yang Efektif dan Perubahan Organisasi. *Fokus Ekonomi*, 7(2), 83–93.  
<http://download.portalgaruda.org/articlei.php?articlei=110046&val=550>
- Marzuiki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Prenada Media.
- Saleih, Z. A. (2008). Demokrasi dan Partai Politik. *Legislasi Indonesia*, 5(1), 56–80.
- Suisanto, N., Suiryani, N. L., Syatoto, I., & Darmadi, D. (2022). Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Global Informasi Berkomunikasi Kebon Jeruk Jakarta Barat. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 1006–1012.  
<https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.576>
- Toni Nasuition, Nuir Hairini Sireigar, Faiz Agung Luithfiansyah, Nadya Ramadhani, Chairuinnisa T.D.Ei Angkat, Raheil Navilia Sihitei, Dheia Afriza Pohan, Ridho Afdal Maruinduri, Muhammad Faiz Panjaitan, Rizky Guinadi Auilia, M. N. (2023). Persamaan dan Perbedaan Sistem Demokrasi Indonesia dengan Negara Lain. 02(01), 23–32.
- Willyam Feirry Abeidneigo, Thamrin, dan S. H. (2014). Fungsi Kepemimpinan dalam Perencanaan di Kantor Pusat PT. Kalimantan Sawit

**Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan**

Volume 10, Nomor 4, November 2024

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 9 Juli 2024, Reviewed 29 Oktober 2024, Publish 29 November 2024 (806-818)

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

Kuisuima Pontianak. Jurnal  
JPMIS Administrasi Negara,  
1–17.

<https://amp.kompas.com/skola/read/20>

21/02/25/130750469/perbedaan-sistem-pemerintahan-indonesia-dengan-malaysia